



## Pengaruh Implementasi Kebijakan Moneter Syariah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia Periode 2020-2023

Octaviana Dainy<sup>1</sup>, Ismatul Hasanah<sup>2</sup>, Siti Sophia<sup>3</sup>, Rasidah Novita Sari<sup>4</sup>

<sup>1-4</sup>Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten,  
Indonesia

Email : <sup>1\*</sup>[221410125.octaviana@uinbanten.ac.id](mailto:221410125.octaviana@uinbanten.ac.id), <sup>2</sup>[221410133.ismatul@uinbanten.ac.id](mailto:221410133.ismatul@uinbanten.ac.id),  
<sup>3</sup>[221410135.siti@uinbanten.ac.id](mailto:221410135.siti@uinbanten.ac.id)

Alamat : Jl. Syech Nawawi Al-Bantani, Kelurahan Sukawana, Kecamatan Curug.

Korespondensi penulis : [221410125.octaviana@uinbanten.ac.id](mailto:221410125.octaviana@uinbanten.ac.id)

**Abstract** The aim of this research is to examine how Indonesia's economic growth in the 2020–2023 era is influenced by the implementation of sharia monetary policy, especially the Bank Indonesia Sharia Certificate (SBIS) and sharia sukuk instruments. This research uses a literature review methodology and analyzes secondary data from sources such as books, scientific journals and articles. An important component of this research is statistical data, which includes information regarding inflation, economic developments and sharia monetary policy collected from official organizations such as the Financial Services Authority (OJK), Bank Indonesia and the Central Statistics Agency (BPS). Economic development and changes in SBIS rates are not significantly correlated, according to data analysis. However, the evolution of Islamic sukuk shows a very encouraging pattern. Investor interest in sharia sukuk is increasing, this shows the enormous potential of this instrument in spurring economic expansion. The findings of this research indicate that sharia sukuk have enormous potential as a source of development financing and can play an important role in driving progress in the Indonesian economy, although the contribution of SBIS is less significant.

**Keywords:** Islamic, monetary, policy, Inflation, Economic

**Abstrak** Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji bagaimana pertumbuhan perekonomian Indonesia pada era 2020–2023 dipengaruhi oleh penerapan kebijakan moneter syariah, khususnya Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS) dan instrumen sukuk syariah. Penelitian ini menggunakan metodologi tinjauan pustaka dan menganalisis data sekunder dari sumber seperti buku, jurnal ilmiah dan artikel. Komponen penting dari penelitian ini adalah data statistik, yang mencakup informasi mengenai inflasi, perkembangan ekonomi dan kebijakan moneter syariah yang dikumpulkan dari organisasi resmi seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia dan Badan Pusat Statistik (BPS). Perkembangan ekonomi dan perubahan tingkat SBIS tidak berkorelasi secara signifikan, menurut analisis data. Namun, evolusi sukuk syariah menunjukkan pola yang sangat menggembirakan. Minat investor terhadap sukuk syariah meningkat, hal ini menunjukkan besarnya potensi instrumen tersebut dalam memacu ekspansi perekonomian. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa sukuk syariah memiliki potensi yang sangat besar sebagai sumber pembiayaan pembangunan dan dapat memainkan peran penting dalam mendorong kemajuan perekonomian Indonesia, meskipun kontribusi SBIS kurang signifikan.

**Kata kunci:** Kebijakan, moneter, syariah, Inflasi, ekonomi

### 1. PENDAHULUAN

Kebijakan moneter adalah upaya untuk mengendalikan kondisi perekonomian suatu negara, terutama dengan tujuan untuk mengendalikan tingkat stabilitas nilai uang dan jumlah uang yang beredar di seluruh negara tersebut. Karena kebijakan moneter sangat terkait dengan uang, maka kebijakan makro diharapkan dapat menjawab pertumbuhan ekonomi pada tingkat mikro sehingga dapat mencapai pertumbuhan ekonomi riil (Imsar & Kurniawan, 2023). Kebijakan moneter adalah seperangkat instrumen yang digunakan oleh Bank Indonesia sebagai

otoritas moneter untuk mengatur dan mengendalikan jumlah uang yang beredar dalam perekonomian. Melalui penyesuaian suku bunga acuan dan operasi pasar terbuka, Bank Indonesia bertujuan untuk mencapai tujuan utamanya dalam menjaga stabilitas Rupiah, mengendalikan inflasi dan mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Oleh karena itu, kebijakan moneter diharapkan dapat menciptakan lingkungan investasi yang kondusif, merangsang konsumsi nasional dan menjaga neraca pembayaran.

Pembangunan suatu negara merupakan sebuah upaya yang kompleks dan membutuhkan perencanaan yang matang. Tujuan pembangunan nasional membutuhkan modal atau dana yang cukup besar dan berkelanjutan. Akibatnya, pemerintah harus membuat dan menerapkan kebijakan yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi secara signifikan. Salah satu upaya yang sering dilakukan adalah dengan meningkatkan kinerja lembaga keuangan negara (Dini Abdianti et al., 2023). Di dalam konteks ini, kebijakan moneter muncul sebagai instrumen yang sangat krusial. Baik dalam sistem ekonomi konvensional maupun ekonomi Islam, kebijakan moneter berperan sebagai alat pengendali yang mengatur seluruh dinamika perekonomian, khususnya dalam sektor keuangan. Dengan kata lain, kebijakan moneter adalah jantung ekonomi. Bank sentral dapat memengaruhi inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas sistem keuangan melalui penggunaan instrumennya, seperti suku bunga, cadangan devisa, dan operasi pasar terbuka. Sektor riil sangat dipengaruhi oleh sistem moneter yang kompleks. Keputusan-keputusan yang diambil oleh otoritas moneter tidak hanya berdampak pada dunia perbankan dan keuangan, tetapi juga merembet ke sektor produksi, konsumsi, dan investasi. Perubahan suku bunga, misalnya, dapat merangsang atau menghambat aktivitas investasi, yang pada gilirannya akan mempengaruhi tingkat produksi dan lapangan kerja.

Pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) merupakan salah satu indikator kemajuan perekonomian Indonesia. Perekonomian global yang lesu, pandemi yang sedang berlangsung dan dampak konflik internasional merupakan faktor-faktor yang berkontribusi terhadap perlambatan perekonomian domestik, oleh karena itu pemerintah Indonesia harus menerapkan dan memaksimalkan interaksi kebijakan fiskal dan moneter. Nilai moneter total dari semua barang dan jasa yang diproduksi suatu negara selama periode waktu tertentu disebut PDB negara. Optimalisasi kebijakan moneter diharapkan dapat mendorong atau menstabilkan pertumbuhan PDB.

Di Indonesia, sistem perbankan telah terbagi menjadi dua jenis utama, yakni perbankan konvensional yang telah lama dikenal dan perbankan syariah yang berbasis pada prinsip-prinsip Islam. Pemisahan tegas antara kedua sistem ini secara resmi diatur dalam Peraturan

Bank Indonesia Nomor 16/12/PBI/2014 yang disahkan pada tanggal 24 Juli 2014. Salah satu instrumen penting yang digunakan oleh Bank Indonesia dalam mengatur stabilitas sistem keuangan syariah adalah Operasi Moneter Syariah (OMS). OMS merupakan suatu rangkaian tindakan yang bertujuan untuk mengelola jumlah uang yang beredar di perbankan syariah dengan cara yang sesuai dengan kaidah-kaidah Islam. Dengan kata lain, OMS merupakan penerapan kebijakan moneter yang dirancang khusus untuk sektor perbankan syariah. Mekanisme kerja OMS melibatkan berbagai kegiatan, di antaranya adalah Operasi Pasar Terbuka syariah yang melibatkan jual beli surat berharga syariah antara Bank Indonesia dengan bank-bank syariah. Selain Operasi Pasar Terbuka Syariah, Bank Indonesia juga menyediakan fasilitas-fasilitas tetap yang berbasis syariah untuk mendukung likuiditas perbankan syariah. Melalui kombinasi dari berbagai instrumen ini, Bank Indonesia berupaya untuk menjaga keseimbangan antara permintaan dan penawaran uang di sektor perbankan syariah, sehingga dapat berkontribusi pada stabilitas sistem keuangan secara keseluruhan. (Sinaga et al., 2022).

Kebijakan moneter Islam memiliki pendekatan yang unik dalam mengatur aliran uang. Dengan secara tegas mengeliminasi segala bentuk transaksi keuangan yang tidak didasari oleh aktivitas ekonomi riil yang produktif seperti produksi barang atau jasa, kebijakan ini berupaya menciptakan keselarasan yang lebih erat antara dunia keuangan dan dunia nyata. (Siregar Yusnita E, 2021). Inti dari kebijakan moneter Islam adalah memastikan bahwa sumber daya ekonomi, baik berupa uang maupun aset lainnya, senantiasa bergerak secara dinamis dalam sistem ekonomi. Gagasan ini konsisten dengan prinsip dasar ekonomi Islam, yang sangat menekankan nilai pertumbuhan ekonomi yang adil dan berkelanjutan. Dipercaya bahwa menjaga aliran sumber daya ekonomi akan meningkatkan output, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan (Imsar & Kurniawan, 2023).

Dalam penelitian ini, fokus utama diarahkan pada analisis terhadap instrumen-instrumen kebijakan moneter syariah seperti Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS) dan sukuk syariah. Kedua instrumen ini dipilih sebagai objek penelitian karena memiliki peran yang signifikan dalam implementasi kebijakan moneter Islam. SBIS dan sukuk syariah merupakan contoh nyata dari upaya untuk mengembangkan instrumen keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, sehingga dapat digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan-tujuan kebijakan moneter Islam.

Dalam kerangka kebijakan moneter Islam, terdapat pendekatan yang sangat spesifik dalam mengelola aliran uang. Prinsip utamanya adalah penolakan terhadap segala bentuk transaksi keuangan yang tidak memiliki akar pada aktivitas ekonomi riil yang produktif, seperti produksi

barang atau jasa. Dengan demikian, kebijakan ini berupaya menciptakan sinergi yang lebih kuat antara sektor keuangan dan sektor riil. Tujuan akhir dari pendekatan ini adalah untuk memastikan bahwa setiap satuan uang yang beredar dalam sistem ekonomi memiliki korelasi langsung dengan aktivitas ekonomi yang menciptakan nilai tambah bagi masyarakat. Melalui pendekatan ini, kebijakan moneter Islam bertujuan untuk menciptakan sistem keuangan yang lebih sehat, efisien dan berkeadilan, di mana setiap transaksi keuangan memiliki kontribusi nyata terhadap pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan (Siregar Yusnita E, 2021).

Berdasarkan latar belakang diatas, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: Pertama, Sejauh mana kebijakan moneter syariah mempengaruhi tingkat inflasi di Indonesia? Kedua, Apa kontribusi kebijakan moneter syariah terhadap laju pertumbuhan ekonomi Indonesia?

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan penelitian ini yaitu menganalisis pengaruh implementasi kebijakan moneter syariah terhadap tingkat inflasi di Indonesia dan pengaruh implementasi kebijakan moneter syariah terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia.

Berdasarkan uraian di atas peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul "Pengaruh Implementasi Kebijakan Moneter Syariah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia".

## **2. TINJAUAN LITERATUR**

### **Kebijakan Moneter Syariah**

Kebijakan moneter syariah merupakan serangkaian strategi yang diterapkan oleh otoritas moneter untuk menjaga stabilitas ekonomi dengan mematuhi prinsip-prinsip syariah. Instrumen-instrumen utama dalam kebijakan moneter syariah meliputi: Pertama, Tingkat Bagi Hasil (Profit Sharing Rate). Berbeda dengan suku bunga konvensional, tingkat bagi hasil digunakan dalam perbankan syariah untuk menentukan pembagian keuntungan antara bank dan nasabahnya. Prinsip ini mencerminkan keadilan dalam berbagi risiko dan hasil dalam transaksi ekonomi Islam. Kedua, Instrumen Pasar Terbuka Syariah (Shariah-Compliant Open Market Operations). Operasi ini melibatkan jual beli surat berharga syariah (SBSN) oleh bank sentral atau lembaga keuangan syariah lainnya untuk mengontrol likuiditas pasar dan stabilisasi suku bagi hasil. Tujuannya adalah untuk mengatur jumlah uang yang beredar sesuai dengan prinsip syariah dan mengendalikan inflasi. Ketiga, Pembiayaan Berbasis Ekuitas. Pendekatan ini melibatkan kerjasama antara pemberi dana (shahibul maal) dan pengelola (mudharib) dalam bentuk mudharabah (bagi hasil) atau musyarakah (kerjasama modal). Dengan menghindari

bunga, pendekatan ini mempromosikan alokasi risiko dan keuntungan yang adil antara pihak-pihak yang terlibat. Keempat, Instrumen Cadangan Wajib (Statutory Reserve Requirement). Instrumen ini mengharuskan bank syariah untuk menyimpan sebagian dari dana nasabahnya dalam bentuk uang tunai atau aset likuid lainnya. Tujuannya adalah untuk menjaga stabilitas keuangan dan menghindari risiko likuiditas yang berlebihan. Kebijakan moneter syariah didesain untuk memajukan nilai-nilai ekonomi Islam seperti keadilan, transparansi, dan stabilitas finansial. Dengan memanfaatkan instrumen-instrumen ini, otoritas moneter dapat mengelola ekonomi dengan cara yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, mendorong inklusivitas ekonomi dan distribusi kekayaan yang lebih adil dalam masyarakat (Mutmainah et al., 2024).

### **Pertumbuhan Ekonomi**

Pertumbuhan ekonomi adalah proses dimana kondisi perekonomian suatu negara membaik seiring berjalannya waktu. Apabila jumlah kegiatan perekonomian melebihi jumlah kegiatan perekonomian pada masa sebelumnya, maka perekonomian dikatakan mengalami perubahan. Dalam hal ini, pertumbuhan ekonomi berbeda dengan pembangunan ekonomi. Blanchard (2003) mendefinisikan Pertumbuhan ekonomi didefinisikan sebagai suatu proses yang menghasilkan peningkatan PDB riil atau pendapatan nasional riil, serta peningkatan output di seluruh struktur perekonomian suatu wilayah atau negara. dalam jangka waktu tertentu. Sementara itu, Todaro (2010) mendefinisikan pembangunan ekonomi sebagai peningkatan kualitas hidup, dengan fokus pada Efisiensi alokasi sumber daya menghasilkan peningkatan produk output agregat. Pembangunan ekonomi berfokus pada pendekatan ekonomi, sosial, dan kelembagaan untuk mempercepat dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat kurang beruntung di negara-negara berkembang. (Martadinata, 2022).

### **Kebijakan Moneter Syariah terhadap Pertumbuhan Ekonomi**

Kebijakan moneter syariah memiliki dampak yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi dengan beberapa aspek utama yang perlu diperhatikan. Pertama, dalam hal stabilitas finansial, kebijakan ini cenderung mendorong stabilitas melalui mekanisme bagi hasil dan larangan terhadap aktivitas spekulatif. Hal ini berbeda dengan sistem konvensional yang lebih rentan terhadap krisis keuangan akibat praktik spekulatif yang berlebihan. Kedua, inklusi keuangan menjadi fokus utama dalam sistem perbankan syariah. Dengan menawarkan alternatif pembiayaan yang sesuai dengan prinsip syariah, seperti mudharabah dan musyarakah, sistem ini memperluas akses keuangan kepada kelompok yang sebelumnya tidak

terlayani oleh perbankan konvensional. Dengan demikian, masyarakat yang lebih luas dapat mengakses pendanaan untuk usaha produktif mereka, mendukung pertumbuhan ekonomi secara inklusif (Rahmad Riho Zeen et al., 2022). Secara keseluruhan, kebijakan moneter syariah tidak hanya mengutamakan kestabilan finansial melalui prinsip-prinsip yang mengurangi risiko spekulatif, tetapi juga mempromosikan inklusi keuangan dan pertumbuhan investasi produktif. Dalam konteks ini, sistem ini memainkan peran penting dalam memperkuat fondasi ekonomi yang lebih stabil dan inklusif, yang pada akhirnya dapat mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan merata.

### **3. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam pengaruh penerapan kebijakan moneter syariah terhadap dinamika pembangunan ekonomi Indonesia. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan atau analisis dokumen. Melalui metode ini, peneliti akan mengumpulkan dan menganalisis data sekunder yang relevan dari berbagai sumber, seperti literatur akademik, laporan penelitian, data statistik, dan kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan kebijakan moneter syariah dan perekonomian Indonesia. Sumber data primer yang akan ditelaah secara intensif mencakup buku, jurnal ilmiah, artikel serta laporan resmi dari lembaga-lembaga terkait, seperti Bank Indonesia, Badan Pusat Statistik (BPS) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Analisis mendalam terhadap data-data tersebut akan memungkinkan peneliti untuk mengidentifikasi korelasi antara kebijakan moneter syariah dengan indikator-indikator makro ekonomi, seperti pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan stabilitas sistem keuangan. Pendekatan ini mendukung peneliti untuk mendapatkan pemahaman yang komprehensif tentang bagaimana kebijakan moneter syariah dilaksanakan, dampaknya terhadap kondisi ekonomi, dan tantangan yang dihadapi dalam implementasinya (Imsar & Kurniawan, 2023).

### **4. PEMBAHASAN**

#### **Pengaruh Kebijakan Moneter Syariah terhadap Inflasi di Indonesia**

Dalam menganalisis pengaruh kebijakan moneter syariah terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia, penting untuk mempertimbangkan juga dampaknya terhadap inflasi. Inflasi, sebagai fenomena kenaikan harga secara umum dan berkelanjutan, memiliki implikasi yang signifikan terhadap berbagai aspek perekonomian. Peningkatan tingkat inflasi yang substansial dapat mengikis daya beli masyarakat, menciptakan ketidakstabilan ekonomi yang meluas, dan pada akhirnya menghambat laju pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan. Oleh

karena itu, dalam penelitian ini, indikator inflasi diintegrasikan sebagai variabel pengendali untuk mengungkap hubungan kausal yang lebih kuat antara instrumen kebijakan moneter syariah dengan kinerja makroekonomi Indonesia. Dengan demikian, analisis ini diharapkan dapat berkontribusi secara signifikan dalam pengembangan kebijakan moneter syariah yang lebih efektif, sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi yang adil dan berkelanjutan.

Tujuan Bank Indonesia, otoritas moneter tertinggi di Indonesia, adalah menstabilkan nilai rupiah dan mempertahankannya. Berbagai kebijakan moneter yang bertujuan untuk mengendalikan inflasi dan menjaga stabilitas sistem keuangan digunakan untuk mencapai tujuan ini. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Bank Indonesia menjadi pedoman Bank Indonesia dalam menjalankan tugasnya. Lebih lanjut, Bank Indonesia bertujuan untuk mendorong perkembangan sektor keuangan syariah yang semakin pesat di Indonesia dengan memasukkan prinsip-prinsip syariah ke dalam implementasi kebijakan moneter. Kebijakan moneter berbasis syariah ini diharapkan dapat mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan dan berjangka panjang. (Kurniawati, 2019).

<b>Tabel 1. Pengaruh Kebijakan Moneter Syariah terhadap Inflasi di Indonesia</b>					
Tahun	Kebijakan Moneter Syariah		Sumber Data	Inflasi (%)	Sumber Data
	SBIS (Milyar Rp)	Sukuk Syariah (Triliun Rp)			
2020	12.844	55.15	OJK	1.68	Bank Indonesia
2021	225	66.45	OJK	1.87	Bank Indonesia
2022	10.788	84.97	OJK	5.51	Bank Indonesia
2023	10.017	99.96	OJK	2.61	Bank Indonesia

Berdasarkan Tabel 1 berikut menunjukkan bagaimana kebijakan moneter syariah yang diterapkan Bank Indonesia dari tahun 2020 hingga 2023 berdampak pada tingkat inflasi Indonesia. Data menunjukkan bahwa nilai SBIS mengalami penurunan yang signifikan selama periode tersebut. Pada tahun 2021, penurunan ini menunjukkan adanya penurunan permintaan terhadap instrumen keuangan syariah sebagai akibat dari pandemi COVID-19 dan kondisi ekonomi global lainnya. Namun, pada tahun 2022, nilai SBIS kembali naik. Tekanan inflasi yang signifikan juga memengaruhi tingkat imbal hasil Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS) (Febi & Nurmaida, 2019).

Analisis data inflasi pada tabel di atas secara jelas mengindikasikan adanya tren kenaikan yang signifikan, terutama pada periode 2022-2023. Puncak lonjakan inflasi tercatat pada tahun 2022, dipicu oleh serangkaian faktor kompleks baik di tingkat domestik maupun global. Di tingkat global, pemulihan ekonomi pasca-pandemi COVID-19 yang tidak merata telah menyebabkan disrupsi rantai pasok yang parah. Ketidakseimbangan antara permintaan yang melonjak dan pasokan yang terbatas mendorong kenaikan harga komoditas secara global. Situasi ini diperparah oleh konflik geopolitik yang memicu ketidakstabilan pasar energi. Selain itu, kebijakan moneter yang bersifat kontraktif yang diterapkan oleh banyak bank sentral dunia untuk meredam tekanan inflasi domestik telah berdampak pada negara-negara berkembang seperti Indonesia. Di dalam negeri, kelangkaan minyak goreng yang terjadi sepanjang tahun 2022 telah memberikan kontribusi signifikan terhadap peningkatan inflasi. Kenaikan harga pangan, energi dan sejumlah komoditas lainnya merupakan konsekuensi langsung dari berbagai faktor tersebut. Perlu ditekankan bahwa baik inflasi yang terlalu tinggi maupun terlalu rendah sama-sama berdampak negatif terhadap perekonomian. Tingkat inflasi yang terkendali dan konsisten merupakan fondasi yang kokoh bagi pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Dengan tingkat inflasi yang stabil, para pelaku ekonomi, baik produsen maupun konsumen, dapat lebih mudah dalam melakukan perencanaan jangka panjang. Hal ini mendorong terjadinya investasi, meningkatkan produktivitas dan pada akhirnya menciptakan lapangan kerja baru. Selain itu, stabilitas harga juga memberikan kepastian bagi para investor asing untuk menanamkan modalnya di dalam negeri, sehingga dapat mempercepat laju pertumbuhan ekonomi.

Sebagai salah satu instrumen kebijakan moneter syariah, SBIS diharapkan dapat berkontribusi dalam menjaga stabilitas harga. Namun, analisis terhadap data inflasi periode 2020-2023 menunjukkan bahwa pergerakan SBIS tidak memiliki pengaruh yang dominan terhadap laju inflasi. Tekanan inflasi yang muncul akibat berbagai faktor, baik dari dalam maupun luar negeri, tidak terpengaruh secara signifikan oleh fluktuasi nilai SBIS.

Berdasarkan laporan oleh Otoritas Jasa Keuangan yang berada pada tabel 1. Untuk perkembangan sukuk syariah di Indonesia periode 2020-2023 mengalami kenaikan yang relatif baik, hal ini dibuktikan dengan jumlah sukuk akumulasi penerbitan pada tahun 2020 sebanyak 274 dengan total nilai jumlah sebesar Rp. 55.15 Triliun, mengalami kenaikan pada tahun 2021 dengan jumlah sukuk akumulasi penerbitan sebanyak 327 dengan total nilai jumlah sebesar Rp 66.45 Triliun, kembali mengalami kenaikan pada tahun 2022 dengan jumlah sukuk akumulasi penerbitan sebanyak 403 dengan total nilai jumlah sebesar Rp. 84.97 Triliun dan pada tahun



2023 dengan jumlah sukuk akumulasi penerbitan sebanyak 457 dengan total nilai jumlah sebesar Rp 99.96 Triliun.

Minat investor terhadap sukuk syariah di Indonesia meningkat drastis dari tahun ke tahun. Hal ini ditunjukkan dengan nilai dan akumulasi penerbitan sukuk negara yang luar biasa sejak awal tahun 2020 hingga tahun 2023. Meski terjadi gejolak perekonomian akibat wabah Covid-19, industri sukuk tidak mengalami penurunan dan terus berkembang dengan baik. Kenaikan sukuk yang signifikan memberikan kepercayaan kepada investor untuk menanamkan investasinya pada instrumen sukuk. (Putra et al., 2023)

Menurut argumen tersebut, ketika inflasi meningkat, pertumbuhan sukuk korporasi menurun. Investor akan dihadapkan pada risiko bahwa inflasi akan melebihi pembayaran kupon, sehingga mengurangi nilai riil investasi sukuk korporasi. Ia mengklaim inflasi mempunyai pengaruh positif yang signifikan terhadap pertumbuhan sukuk korporasi Indonesia. Hal ini konsisten dengan anggapan bahwa ketika inflasi meningkat maka pertumbuhan sukuk korporasi menurun. Inflasi menimbulkan risiko yang lebih besar bagi investor dibandingkan pembayaran margin/fee karena inflasi mengurangi jumlah barang yang diproduksi oleh produsen atau perusahaan, sehingga menurunkan nilai investasi sukuk korporasi (Mastura et al., 2023).

### **Pengaruh Kebijakan Moneter Syariah terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia**

<b>Tabel 2. Pengaruh Kebijakan Moneter Syariah terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia</b>					
Tahun	Kebijakan Moneter Syariah		Sumber Data	Pertumbuhan Ekonomi (%)	Sumber Data
	SBIS (Milyar Rp)	Sukuk Syariah (Triliun Rp)			
2020	12.844	55.15	OJK	2.7	Badan Pusat Statistik (BPS)
2021	225	66.45	OJK	3.7	BPS
2022	10.788	84.97	OJK	5.3	BPS
2023	10.017	99.96	OJK	4.8	BPS

Tabel 2 menggambarkan pengaruh kebijakan moneter syariah terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia dari tahun 2020 hingga 2023.

Berdasarkan data Tabel 2, tidak ditemukan hubungan yang pasti antara perkembangan nilai SBIS dengan laju pertumbuhan ekonomi Indonesia selama kurun waktu 2020 hingga 2023. Analisis lebih lanjut menunjukkan bahwa nilai SBIS cenderung tidak stabil dari tahun

ke tahun. Nilai SBIS mengalami fluktuasi yang cukup signifikan dari tahun ke tahun. Penurunan nilai SBIS pada tahun 2021 tidak diikuti dengan penurunan pertumbuhan ekonomi, bahkan pertumbuhan ekonomi justru meningkat. Hal ini mengindikasikan bahwa faktor lain selain nilai SBIS memiliki pengaruh yang lebih dominan terhadap pertumbuhan ekonomi.

Pada tahun 2022, terjadi peningkatan nilai SBIS menjadi Rp10.788 miliar, seiring dengan tambahan pertumbuhan ekonomi yg melonjak menjadi 5,7%. Peningkatan pertumbuhan ekonomi tahun 2022 ini didorong oleh beberapa faktor, di antaranya membaiknya perekonomian global, khususnya mitra dagang utama Indonesia dan peningkatan harga komoditas internasional yang memberikan dampak positif bagi ekspor negara. Secara umum, pertumbuhan ekonomi Indonesia mengalami peningkatan selama periode 2020-2023. Peningkatan pertumbuhan ekonomi pada tahun 2022 terutama didorong oleh pemulihan ekonomi global dan kenaikan harga komoditas internasional.

Pertumbuhan ekonomi juga dipengaruhi oleh Sukuk Syariah. Sukuk adalah instrument keuangan syariah yang berupa surat berharga jangka panjang dengan berlandaskan hukum islam yang diterbitkan emiten dalam bentuk bagi hasil kepada pemegang obligasi syariah dan pembayaran dana obligasi pada saat batas waktu pembayaran (Nur Arifianti & Hidayati, 2023).

Suatu negara memerlukan dana tambahan sebagai upaya dalam mendukung kemajuan ekonomi yaitu sarana dan prasarana. Satu di antara yang lain pendanaan yang dapat dimanfaatkan pemerintah adalah dengan mempublikasikan sukuk (Aprianto & Indrarini, 2021). Instrument dalam bidang investasi yang dapat memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi salah satunya yaitu sukuk. Dengan diterapkannya sukuk, pemerintah dan swasta dapat menggunakan sukuk untuk menampung dana dari masyarakat yang mampu digunakan untuk mengalokasikan keperluan APBN untuk mendanai berbagai macam kegiatan infrastruktur atau kegiatan strategis nasional lainnya (Aprianto & Indrarini, 2021).

Berdasarkan tabel terlihat bahwa selama 4 tahun terakhir jumlah nilai sukuk setiap tahunnya selalu menunjukkan kenaikan dari periode tahun 2020 dengan nilai sebesar Rp.55.15 Triliun hingga 2023 dengan nilai Rp.99.96 Triliun, hal ini mengindikasikan adanya perkembangan saham syariah di Indonesia yang cukup baik dalam penerimaan pasar terhadap instrument investasi syariah. Hal ini bisa jadi dikarenakan semakin banyaknya masyarakat ataupun investor muslim yang sadar akan pentingnya berinvestasi sesuai prinsip syariah. Menurut teori Keynes, salah satu variabel pendukung dalam mempengaruhi kemajuan ekonomi yaitu investasi. Kenaikan sukuk syariah yang semakin tinggi dan meningkat, maka semakin meningkat pula laju pertumbuhan ekonomi Indonesia. terdapat dampak positif sukuk syariah

atas pertumbuhan ekonomi Indonesia sebab sukuk adalah suatu metode dalam memajukan kualitas pertumbuhan ekonomi melalui investasi ataupun pembentukan modal. kehadiran instrument sukuk dapat bermanfaat dalam menggapai target pemerintah yaitu mempercepat dan pemeratakan infrastruktur di berbagai wilayah sehingga infrastruktur dapat mendorong kegiatan perekonomian pada wilayah tersebut. Ketersediaan infrastruktur yang memadai dapat menunjang seluruh aktivitas perekonomian seperti distribusi barang dan jasa menjadi lebih lancar dan cepat maka kegiatan perekonomian di suatu wilayah tidak terganggu serta dapat menunjang pertumbuhan perekonomian suatu negara.

## 5. KESIMPULAN

Analisis pengaruh kebijakan moneter syariah, khususnya instrumen SBIS atau biasa diperkenalkan dengan Sertifikat Bank Indonesia Syariah dan Sukuk Syariah atas pertumbuhan ekonomi di negara Indonesia dan inflasi periode 2020-2023. Berdasarkan analisis data menunjukkan bahwa SBIS tidak menunjukkan hubungan yang jelas dan konsisten. Fluktuasi nilai SBIS secara langsung tidak memengaruhi pergerakan inflasi dan pertumbuhan ekonomi. Faktor eksternal seperti pandemi COVID-19, konflik geopolitik, dan kebijakan moneter konvensional negara lain memiliki pengaruh yang lebih dominan terhadap perkembangan ekonomi Indonesia selama periode tersebut. Meskipun SBIS tidak menunjukkan korelasi yang kuat, perkembangan sukuk syariah di Indonesia justru menunjukkan tren positif. Peningkatan jumlah dan nilai sukuk menunjukkan minat investor yang semakin besar terhadap instrumen investasi syariah. Hal mengenai ini sejalan dengan teori ekonomi yang mengatakan bahwa peningkatan investasi dapat mendorong pertumbuhan ekonomi.

## DAFTAR PUSTAKA

- Aprianto, S. W., & Indrarini, R. (2021). Analisis hubungan saham syariah dan sukuk terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2010-2019. *Jurnal Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Sosial (EMBISS)*, 2(1), 68–83.
- Dini Abdianti, A., Restu, A., & Al Ayyubi, S. (2023). Konsep kebijakan moneter dalam perspektif ekonomi Islam. *Jurnal Kewirausahaan Dan Manajemen Bisnis: Cuan*, 1(2), 106–120. <https://doi.org/10.59603/cuan.v1i2.20>
- Febi, F., & Nurmaida, D. (2019). Analisis pengaruh tingkat inflasi, transaksi pasar uang antar bank syariah (PUAS) dan investasi syariah terhadap imbal hasil sertifikat bank Indonesia syariah (SBIS). *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 3(2), 164–186. <https://doi.org/10.32505/v3i2.1243>

- Imsar, & Kurniawan, M. (2023). Implementasi konsep moneter Islam berdasarkan pandangan M. Umar Chapra terhadap kebijakan moneter di Indonesia. *Ekonomi Bisnis Manajemen Dan Akuntansi (EBMA)*, 4(1), 1223–1229.
- Kurniawati, F. (2019). Pengendalian inflasi dalam perspektif ekonomi Islam (studi efektivitas instrumen moneter syariah di Lampung). *Adzkiya: Jurnal Hukum Dan Ekonomi Syariah*, 6(2), 1–24.
- Martadinata, M. A. (2022). Analisis pengaruh pertumbuhan penduduk, tenaga kerja, investasi, dan inflasi terhadap pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2015-2019. *Diponegoro Journal of Economics*, 11(1), 37–45.
- Mastura, J. A., & Yahya, M. (2023). Pengaruh inflasi, BI Rate, dan jumlah uang beredar terhadap pertumbuhan sukuk korporasi. *Jii*, 8(1), 26–37. <https://doi.org/10.32505/jii.v8i1.5938>
- Mutmainah, A., Khairiyah, D. C., Nasution, H. R., Sambo, R. A., & Cahya, S. D. (2024). Kajian peran kebijakan moneter syariah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia. *Indonesian Research Journal on Education*, 4(2), 567–573. <https://doi.org/10.31004/irje.v4i2.613>
- Nur Arifianti, S. O., & Hidayati, A. N. (2023). Pengaruh sukuk, reksadana syariah, saham syariah, dan tingkat inflasi terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia periode 2014-2021. *Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah*, 5(6), 2901–2920. <https://doi.org/10.47467/alkharaj.v5i6.3711>
- Putra, D. H., Shafa, S., & Hamidy, A. (2023). Pengaruh inflasi, saham syariah, sukuk, reksadana syariah dan asuransi syariah terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia tahun 2015-2022. *Borneo Islamic Finance and Economics Journal*, 3(1), 1–18. <https://doi.org/10.21093/bifej.v3i1.6259>
- Rahmad Riho Zeen, I., Alfi Lubis, I., Ilham Ramadhan, F., Hanif, H., & Tambunan, K. (2022). Analisis pengaruh kebijakan moneter syariah terhadap perkembangan ekonomi di Indonesia. *CEMERLANG: Jurnal Manajemen Dan Ekonomi Bisnis*, 2(4), 259–269. <https://doi.org/10.55606/cemerlang.v2i4.624>
- Sinaga, A. S., Fuadi, A., & Sinaga, A. (2022). Peranan instrumen kebijakan moneter syariah terhadap pertumbuhan ekonomi di Sumatera Utara periode 2012-2021. *Journal of Management, Economic and Accounting (JMEA)*, 1(2), 62–71. <https://pusdikra-publishing.com/index.php/jisc>
- Siregar, Y. E. (2021). Kerangka kerja kebijakan moneter dalam Islam, 2, 6.